

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA UAKPB

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
BAGIAN ANGGARAN 005.04
SEMESTER I TAHUN 2021**

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

B. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan Agama.

C. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2021.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Semester I Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar

Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,- (nol rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAIBA-SIMAK pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2021

A. Saldo Awal Semester I TA 2021

Nilai BMN per 31 Desember 2020 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2021 sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang persediaan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	380.479	0	380.479
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	380.479	0	380.479

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan yang dalam kondisi rusak senilai Rp0,- (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,- (nol rupiah) .

2. Tanah

Tidak ada BMN berupa Tanah pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak ada BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

4. Gedung dan Bangunan

Tidak ada BMN berupa Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada BMN berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

6. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

8. Aset Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

9. BMN berupa Aset Bersejarah

Tidak ada BMN berupa Aset Bersejarah pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

C. Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Per 30 Juni Tahun Anggaran 2021

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
I	ASET LANCAR	0		0		0	
	Persediaan	380.479	100,00	0	0,00	380.479	100,00
II	ASET TETAP	0		0		0	
	Tanah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Peralatan dan Mesin	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gedung dan Bangunan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
III	ASET LAINNYA	0		0		0	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Aset tak Berwujud	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Aset yang dihentikan dari penggunaan Operasional Pemerintah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOTAL (I + II + III)	380.479		0		380.479	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2021 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
I	ASET TETAP	0		0		0	
	Peralatan dan Mesin	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gedung dan Bangunan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II	ASET LAINNYA	0		0		0	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Aset tak Berwujud	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Aset yang dihentikan dari penggunaan Operasional Pemerintah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOTAL (I + II)	0		0		0	

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2021 per akun neraca adalah sebagai berikut :

<i>NAMA ASET</i>	<i>LAPORAN BARANG</i>	<i>LAPORAN KEUANGAN</i>	<i>SELISIH</i>
Persediaan	380.479	380.479	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
TOTAL	380.479	380.479	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

<i>NO</i>	<i>PERIODE PELAPORAN</i>	<i>NILAI BMN</i>	<i>PERKEMBANGAN</i>	
		<i>RP.</i>	<i>RP.</i>	<i>%.</i>
1	2019 (Semester I)	883.553	0	0
2	2019 (Semester II)	591.151	(292.402)	(33,09)
3	2020 (Semester I)	591.151	0	0
4	2020 (Semester II)	380.479	(210.672)	(55,37)
5	2021 (Semester I)	380.479	0	0

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAH- TANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

c. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang rusak berat

Tidak ada Daftar Barang Rusak Berat pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

b. Daftar barang hilang

Tidak ada Daftar Hilang pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, belum ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
Per 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Barang,



Hj. Laila Istiadah, S.Ag.
NIP. 19700822 200003 2 001